

Sekuritisasi Ancaman Insurgensi dan Terorisme Asia Tenggara: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina

Jerry Indrawan¹, Didik Supriyadi²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta¹, Universitas Paramadina²

Email: jerry.indrawan@upnvj.ac.id



INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Research Article

Kata Kunci: Abu Sayaf, Asia Tenggara, *Islamic State*, Konvergensi Insurgensi, Sekuritisasi, Terorisme

Article History

Dikirim : 23 Maret 2025

Diterima: 30 Mei 2025

Dipublikasi: 01 Agustus 2025

Abu Sayyaf adalah kelompok teroris yang berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Aksi teror kelompok Abu Sayyaf sudah memasuki wilayah negara-negara tetangga Filipina. Penanganannya menjadi lebih komprehensif dan perlu melibatkan negara lain, baik secara bilateral, maupun regional. Perairan Asia Tenggara dinyatakan sebagai wilayah yang rawan kejahatan sehingga kerja sama dan sekuritasi isu dalam bidang militer, politik, dan penegakan hukum antar anggota ASEAN perlu ditingkatkan. Aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok insurgen Abu Sayyaf dan Klan Maute sudah terlibat dengan organisasi terorisme IS (*Islamic State*). Konvergensi insurgensi dan terorisme membutuhkan strategi kontrainsurgensi dan kontraterorisme. Tulisan ini akan membahas insurgensi dan terorisme kelompok Abu Sayyaf dilihat dari perspektif sekuritisasi. Teori yang digunakan adalah mazhab Kopenhagen dan sekuritisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka.

Abstract

Abu Sayyaf is a terrorist group that has the potential to threaten stability and security in the Southeast Asia region. Abu Sayyaf's terrorist actions have entered the territory of neighboring countries of the Philippines. Handling it has become more comprehensive and needs to involve other countries, both bilaterally and regionally. Southeast Asian waters are declared as areas prone to crime so that cooperation and security issues in the military, political, and law enforcement fields between ASEAN members need to be improved. Terrorist actions carried out by the insurgent groups Abu Sayyaf and the Maute Clan have been involved with the terrorist organization IS (Islamic State). The convergence of insurgency and terrorism requires counterinsurgency and counterterrorism strategies. This paper will discuss the insurgency and terrorism of the Abu Sayyaf group from a securitization perspective. The theories used are the Copenhagen school and securitization. This study uses a descriptive qualitative approach through literature studies.

Pendahuluan

Negara-negara Asia Tenggara dikonfrontasi oleh ancaman baik secara domestik maupun non-domestik. Dikenal juga dengan istilah ancaman non-tradisional atau non-militer, yang sifatnya melampaui batas-batas negara. Ancaman non-domestik hadir bersamaan dengan pergerakan aktor yang melewati batas-batas negara. Organisasi seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF), Gerakan Mujiheddin Islami Pattani (GMIP), dan kelompok Abu Sayyaf Group memiliki agenda yang tidak hanya bersifat domestik untuk menguasai wilayah mereka, namun juga melakukan aliansi taksis dan operasi transnasional untuk mencapai tujuan mereka (Abuza, 2011).

Kelompok Abu Sayyaf mulai dikenal pada semester pertama 1990-an. Kelompok Abu Sayyaf dibentuk oleh Abdurajak Abubakar Janjalani, yaitu anak dari seorang tokoh ulama dari Basilan, Filipina, yang pernah mengikuti pelatihan militer bersama ratusan militan Moro ke Afghanistan untuk menjadi tentara Mujahidin Afghanistan dalam berperang melawan Uni Soviet (Wibisono, 2016).

Juma'a Abu Sayyaf yang berarti "Ayah Ahli Pedang", mulai eksis setelah keluar diri dari kelompok separatis Moro National Liberation Front (MNLF) di Filipina pada tahun 1991. Misi Abdurajak Abubakar Janjalani mengajak bekas anggota MNLF ikut dalam menjadikan Filipina Selatan sebagai negara Islam yang merdeka. Motivasinya adalah untuk mencari keadilan bagi semua umat Islam, khususnya di Filipina Selatan. Abubakar Janjalani juga menyebarkan ideologi radikal, yang mana ia berpendapat bahwa jihad itu disalahartikan oleh banyak Muslim (Atkinson, 2012).

Pada Desember 1998 Abubakar Janjalani Tewas terbunuh dalam serangan militer Filipina (New York Times, 2002). Hal ini berdampak besar pada struktur Abu Sayyaf. Pasca kematiannya kepemimpinan Abu Sayyaf berada ditangan adiknya yaitu Khadafy Janjalani. Namun, Khadafy tidak memiliki kualitas kepemimpinan seperti kakaknya yang menegaskan kendali penuh atas Abu Sayyaf. Hal ini menyebabkan struktur Abu Sayyaf terpecah di beberapa wilayah. Sejak kepemimpinan Khadafi, Abu Sayyaf terbagi menjadi dua yang berbasis di Basilan dan Sulu (Banlaoi, 2008). Kelompok yang berbasis di Basilan dipimpin oleh Abu Sabaya, sementara yang berbasis di Sulu dipimpin oleh

Ghalib Andang dengan aktivitas utamanya, yaitu tindakan penculikan dan meminta tebusan.

Meskipun Khadafy Janjalani berada di Basilan, tetapi ia dikendalikan oleh Abu Sabaya (Aldam Tilao) yang melakukan penculikan dan meminta tebusan juga. Adanya dua faksi ini menunjukkan Abu Syyaf mengalami fase degenerasi yang menjadikannya seperti kelompok penjahat. Ghalib Andang dan Abu Sabaya telah merubah Abu Syyaf dari organisasi teroris-religijs menjadi yang dinamakan pengusaha kekerasan (*entrepreneur of violence*). Menurut militer Filipina, pada kuartal kedua tahun 2008 tercatat anggota Abu Syyaf sekitar 380 orang. Kalau dibandingkan dengan kekuatan personel MILF dengan 10.000 personel, maka kekuatan kelompok Abu Syyaf sangat kecil (Banloi, 2008).

Abu Syyaf bukan kelompok homogen, tetapi merupakan koalisi dari bermacam-macam kelompok yang memiliki tujuan mulai dari fundamentalisme Islam hingga kriminal. Tidak semua kelompok benar-benar berkomitmen pada tujuan Abu Syyaf, namun kelompok-kelompok lain tersebut ingin dikaitkan dengan Abu Syyaf untuk kepentingan politik, prestise, dan keuntungan ekonomi semata (Banlaoi, 2008). Selain di Basilan dan Sulu masih terdapat kelompok lain yang beroperasi di Kota Zamboanga yang dipimpin oleh Hadji Radzpal, yang juga telah diidentifikasi sebagai salah satu pemimpin kelompok bersenjata yang beroperasi di Sulu.

Kelompok Abu Syyaf juga mengakui bahwa mereka mempunyai hubungan dengan organisasi teroris lainnya, seperti Jemaah Islamiyah (JI), MILF, Al-Qaeda. dan IS. Pada masa kepemimpinan Isnilon Totoni hingga tahun 2017, Abu Syyaf megangkat sumpah untuk patuh kepada IS. Hal ini terjadi karena Isnilon Totoni adalah ketua IS cabang Filipina. Pada masa kepemimpinan Isnilon Totoni ini sering terjadi penculikan dan penyanderaan orang asing di perairan Filipina. Targetnya beragam, mulai dari turis mancanegara, nelayan, kapal-kapal pengangkut batu bara, sampai dengan warga sipil. Dalam aksinya Abu Syyaf mulai melakukan kegiatan yang mirip dengan kelompok IS, seperti melakukan pembunuhan sandera dan melakukan aksi penggorokan untuk direkam sebagai sarana menyebarkan teror, bahwasanya kelompok mereka masih eksis (Fellman, 2011).

Abu Sayyaf bisa dikatakan memiliki pendanaan tetap, yaitu dari pajak keamanan yang diberikan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain, seperti perdagangan ganja ke wilayah Taiwan dan beberapa daerah China. Hal ini menyebabkan kelompok Abu Sayyaf mejadi lebih sistematis dan mandiri. Namun, karena adanya tekanan yang besar dari militer Filipina menyebabkan Abu Sayyaf mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana. Akibat kurangnya aliran dana, Abu Sayyaf sering melakukan penculikan untuk mendapatkan tebusan berupa uang (Pujayanti, 2016).

Penulis mencatat sekitar 486 insiden terorisme yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf sejak tanggal 18 Februari 1994 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016. Tindakan terorisme ini telah memunculkan kekhawatiran diantara negara Asia Tenggara karena sudah melintasi batas ke wilayah negara lain dan tentu saja menjadi ancaman, baik ancaman terhadap manusia maupun negara, di Asia Tenggara. Tulisan ini akan membahas ancaman insurgensi dan terorisme Abu Sayyaf di Filipina dilihat dari sudut pandang sekuritisasi.

Tinjauan Pustaka

Istilah sekuritisasi pertama diciptakan oleh Ole Waever tahun 1995. Konsep sekuritisasi membahas bagaimana sebuah masalah ditransformasikan oleh aktor-aktor sekuritisasi menjadi sebuah masalah keamanan. Keamanan tidak hanya soal militer, kekuasaan, dan polaritas. Sekuritisasi adalah versi yang ekstrim dari politisasi yang memungkinkan digunakannya cara-cara yang luar biasa atas nama keamanan. Studi sekuritisasi bertujuan untuk memahami “siapa yang melakukan sekuritisasi, (*securitizing actor*) terhadap isu atau ancaman apa, dari siapa, (*referent object*), mengapa, hasilnya apa, dan dalam kondisi apa (Buzan dan Weaver, 2003).

Intepretasi sempit dari keamanan berfokus pada negara dan pertahanannya dari serangan militer negara lain. Copenhagen School menekankan bahwa keamanan adalah soal bertahan hidup (*survival*), karena itu masalah keamanan sangat terkait dengan ancaman yang ada (eksis), termasuk masalah-masalah non-militer. Mazhab ini memperluas konsep keamanan menjadi lima kategori, yaitu keamanan militer, lingkungan, ekonomi, masyarakat, politik. Dinamika dari masing-masing kategori

ini ditentukan oleh aktor-aktor sekuritisasi, yang didefinisikan sebagai aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi dengan menyatakan sesuatu, dan negara menjadi objek utama yang harus diamankan (*referent object*), yang secara nyata-nyata terancam (Buzan dan Weaver, 2003).

Aktor-aktor ini bisa pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, pelobi, dan kelompok penekan. *Referent object* adalah sesuatu yang terancam dan memiliki hak *legitimate* untuk bertahan hidup (bisa negara, militer, ideologi, kedaulatan nasional, ekonomi, identitas, spesies atau habitat). Selain itu, *referent objects* bisa juga individu atau kelompok, seperti pengungsi, korban pelanggaran HAM, dll (Buzan dan Weaver, 2003).

Sebuah masalah bisa disekuritisasi apabila opini publik, pejabat militer, politisi, dan elit-elit lainnya yakin bahwa masalah tersebut dapat menjadi ancaman nyata terhadap *referent objects* di atas. Aktor-aktor sekuritisasi bisa jadi pemerintah, elit politik, militer, masyarakat sipil. Mereka melakukan sekuritisasi terhadap sebuah isu dengan menyambungkan adanya ancaman dengan keberlangsungan hidup dari *referent object* tertentu (Indrawan, 2019).

Pendekatan mengenai keamanan dan sekuritisasi dapat dilakukan dengan perspektif *Copenhagen School* yang menjelaskan bahwa objek ancaman semakin meluas khususnya pada aspek keamanan sosial ataupun identitas. Pandangan ini juga berbicara mengenai signifikansi isu pada tingkat regional dan bagaimana sekuritisasi dilakukan. Sekuritisasi adalah proses sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengkonstruksikan isu tertentu sebagai sebuah ancaman. Dalam hal ini *Copenhagen School* memberikan ruang bagi pemikir konstruktivis untuk menganalisis ancaman studi strategi tradisional (Stritzel, 2011).

Buzan (1998) mendefinisikan keamanan dalam konteks militeristik tradisional. Keamanan berbicara mengenai kelangsungan hidup yang berjalan ketika sebuah isu dihadirkan dan berimplikasi terhadap sikap dari ancaman untuk suatu objek khusus. Dinamika dari masing-masing sektor keamanan diukur melalui bagaimana menjadikan aktor sebagai isu keamanan dan objek terkait. Aktor kemudian dijadikan sebagai isu keamanan ketika mendeklarasikan suatu objek khusus menerima ancaman. Objek khusus merupakan hal yang secara eksistensial menerima ancaman dan memiliki

legitimasi untuk mengklaim kelangsungan hidup. Dalam hal ini negara, kedaulatan nasional, ekonomi nasional identitas kolektif termasuk sebagai bagian dari objek khusus.

Copenhagen School memandang keamanan sebagai konsep dari konstruksi sosial. Fokus politik menjadi bagian penting dari sekuritisasi. Sekuritisasi didefinisikan sebagai sebuah isu dari ancaman eksistensial yang menegaskan posisinya untuk dikeluarkan dari proses politik atas urgensi kasus tersebut (Buzan & Waever, 2003). Secara spesifik Emmers (2003) memaparkan kontur sekuritisasi Asia Tenggara terhadap kejahatan transnasional. Kepala negara, serta bagian dari pemerintahan merupakan aktor yang melakukan sekuritisasi isu. Fokus aktor direfleksikan dari deklarasi dan pernyataan yang dikemukakan. Kejahatan transnasional digambarkan sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan stabilitas regional dalam aspek keamanan militer, kedaulatan negara dan aturan hukum dalam aspek keamanan politik, struktur sosial masyarakat Asia Tenggara dan untuk pembangunan ekonomi. Namun, pada kenyataannya ASEAN mengalami berbagai hambatan untuk mengimplementasikan kerjasama regional dalam bentuk *joint action* karena latar belakang stabilitas domestik yang masih belum terpenuhi. Model konsensus dan penolakan untuk melakukan reformasi institusional juga menghambat implementasi kerjasama (Emmers, 2003).

Selanjutnya, terorisme dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang dimotivasi oleh latar belakang politik melawan sipil dan dikonduksi dengan intensi penyerangan melalui rasa takut (Davis, 2004). Insurgensi didefinisikan sebagai pergerakan populer yang dilakukan untuk mengubah *status quo* melalui aksi subversi, politik, insurreksi, konflik bersenjata, hingga terorisme (Marks, 2004). Melalui definisi tersebut fenomena jihad global dapat dikatakan sebagai insurgensi yang mana meletakkan terorisme sebagai taktik utama. Kelompok teroris memiliki pandangan anti Barat dan dimotivasi oleh latar belakang agama. Namun, pandangan yang semula berambisi untuk menyebarkan padangan fundamental secara massif kemudian bergabung dengan kelompok gerilyawan lokal yang ingin melindungi budaya lokal mereka ditengah kehadiran Barat dengan pandangan anti-kolonialisme (Kilcullen, 2009). Secara tradisional, acaman terorisme bersifat nasional namun seiring dengan berkembangnya alur informasi, terorisme dan insurgensi muncul sebagai isu regional hingga global.

Secara tradisional, ancaman terorisme bersifat nasional, namun seiring dengan berkembangnya alur informasi, terorisme dan insurgensi muncul sebagai isu regional hingga global. Hal ini tidak lain karena ancaman ini tidak dapat ditinggalkan dengan hanya bergantung terhadap satu negara. Bersamaan dengan kehadiran globalisasi, ancaman terorisme yang dalam cakupan domestik bereskalasi pada ruang regional tidak lain disebabkan oleh ideologi ekstrimisme dan kekerasan yang dapat bertumbuh dan berkembang dengan cepat pada cakupan geografis yang relatif dekat dan mengubah stabilitas politik suatu kawasan (Gunaratna, 2018).

Pasca peristiwa 9/11, ancaman yang dihadapi oleh Asia Tenggara, yakni kehadiran terorisme Islam Radikal dan insurgensi. Terorisme dan insurgensi merupakan terminologi yang hampir dapat bertukar satu sama lain dalam penggunaan bahasa komunitas internasional. Perbedaan keduanya terletak pada kesulitan memberantas lawan yang tidak memiliki kategori perilaku dalam ancaman tradisional konvensional bersenjata. Terorisme merupakan taktik yang digunakan oleh suatu kelompok untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Terorisme menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mengintimidasi audiens spesifik untuk memenuhi tuntutan kelompok tersebut. Kehadiran kekerasan dan penggunaan senjata berimplikasi terhadap respon militer dan kebijakan pemerintah yang terlalu berfokus terhadap ancaman bersenjata untuk memenuhi kebutuhan keamanan (Santos, 2011).

Berdasarkan ancaman kontemporer terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, muncul kesadaran bahwa institusi regional perlu mengambil peran dalam menjalankan strategi kontraterorisme. Namun upaya tersebut mengalami beberapa hambatan. Borelli (2017) mengemukakan setidaknya terdapat beberapa faktor, Pertama, hambatan struktural untuk menjalankan aksi kontra-terorisme, yaitu keterikatan anggota ASEAN dengan ASEAN Way, yaitu kesepakatan yang berdasarkan konsensus, menghormati kedaulatan nasional negara, serta prinsip non-intervensi. Kedua, proses yang lambat, karena ASEAN dalam membuat kebijakan harus mengikuti proses panjang dari legislasi, ratifikasi dan implementasi, yang mana kesemuanya membutuhkan waktu lama. Ketiga, pengaruh dari kebijakan regional yang lemah, dalam hal ini ASEAN hanya membuat hukum berdasarkan internalisasi norma yang mana dengan perbedaan kultural dapat menjadi dasar negara anggota menginterpretasikan

kebijakan sesuai nilai-nilai domestik masing-masing. Keempat, banyaknya sengketa wilayah antara sesama negara-negara ASEAN, mengakibatkan munculnya ruang bagi teroris untuk berkembang. Kelima, kurangnya upaya pencegahan agenda kontraterorisme. Keenam, kurangnya perlindungan infrastruktur kritis, seperti wilayah perbatasan negara-negara ASEAN.

Selain kontraterorisme, kontrainsurgensi merupakan konsep yang perlu dipahami lebih lanjut dalam kaitan aktivitas anti-pemerintah. Kontrainsurgensi merupakan bagian dari strategi militer pemerintah. Terminologi kontrainsurgensi dikemukakan Walt Rostow (1962) sebagai seperangkat taktik, teknik, dan diskursus yang digabungkan untuk memproduksi berbagai perang kecil dalam kaitannya dengan kolonisasi dan dekolonisasi. Kontrainsurgensi melibatkan intervensi militer, operasi penjaga perdamaian, serta bantuan luar negeri. Kontrainsurgensi mengerahkan militer untuk melawan serangan gerilya hingga populasi sipil, dan kebayakan dianggap sebagai alat untuk mengakhiri konflik. Kontrainsurgensi menggunakan militer dan aparat pemerintah, sampai penggunaan bahasa humanitarianisme sebagai justifikasi operasi militer. Dalam berbagai bentuk kontrainsurgensi, proses yang dilakukan bukan bersifat persuasif, namun intimidatif dan teror (Gregory, 2006).

Relasi kontraterorisme dan kontrainsurgensi dapat dipahami pada tulisan Boyle (2010), yang mengatakan bahwa strategi kontrainsurgensi internasional merupakan alat yang digunakan untuk mendukung kontraterorisme domestik. Hal ini tidak lain karena terdapat rantai teror yang didapatkan dari komunitas internasional atas aksi terorisme domestik. Contohnya adalah aktivitas terorisme transnasional Al-Qaeda yang terjadi di Afghanistan dan Pakistan yang juga melibatkan kelompok insurgensi domestik Taliban, di mana kenyataannya menyebarkan ketakutan hingga tingkat internasional. Persamaan utama dari kontraterorisme dan kontrainsurgensi tidak lain adalah penggunaan militer untuk menghentikan aksi anti-pemerintah. Kontrainsurgensi dan kontraterorisme dilakukan secara langsung melawan jaringan teroris dan tidak langsung untuk mempengaruhi lingkungan global dan regional yang tidak ramah terhadap jaringan teroris. Kontraterorisme dan kontrainsurgensi digunakan untuk meningkatkan penggunaan kekuatan militer guna melakukan aksi

pre-emptif dan memperkuat posisi negara di pandangan masyarakat dan aktor teroris transnasional (Boyle 2010).

Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi tentang sekuritisasi ancaman insurgensi dan terorisme Asia Tenggara, khususnya menggunakan studi kasus kelompok Abu Sayyaf. Penulis menggunakan jenis data sekunder, di mana materi-materi yang dapat mendukung penelitian ini diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber berita dari internet, khususnya penerbitan sepuluh tahun terakhir agar nuansa kebaruan datanya lebih terlihat. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini akan menangkap informasi tentang subjek yang dikaji dalam penelitian, yaitu ancaman insurgensi dan terorisme.

Hasil dan Pembahasan

Sekuritisasi Ancaman Terorisme di Asia Tenggara

Kesadaran negara-negara Asia Tenggara yang menganggap kejahatan transnasional seperti isu terorisme sebagai isu keamanan, belum nyata sampai terjadinya peristiwa 9/11. Terorisme jadi suatu isu penting dalam agenda keamanan regional mulai 2002 bersamaan terjadinya Bom Bali. Sejak itulah, urgensi terhadap ancaman terorisme di kawasan mulai diperhitungkan. Peristiwa ini diikuti oleh KTT ASEAN Phnom Penh pada 3 November 2002. Perjanjian selanjutnya yang terbentuk adalah Bali Concord II tahun 2003, yang kemudian membentuk ASEAN Political Security Community (APSC). Pembentukan APSC dapat dipahami untuk menyelesaikan persengketaan wilayah antar negara-negara ASEAN. Perjanjian selanjutnya terbentuk pada 2007 ditandai dengan kehadiran ASEAN Convention on Counter-terrorism (ACCT). Konvensi ACCT pada tahun 2007 diadopsi kembali pada ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism tahun 2009. Adapun substansi dari perjanjian ini, antara lain adalah untuk melawan, mencegah, dan menekan terorisme, serta organisasi teroris dan asosiasi melalui kerjasama dengan resolusi dan elemen kontraterorisme United Nations

Security Council (UNSC), implementasi kerangka kerja regional berdasarkan perjanjian, pembangunan mekanisme institusionalisasi dan pertukaran informasi dan pengawasan intelijen, serta melacak kelompok teroris.

Alhasil, pendekatan keamanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan bersamaan dengan dinamika internasional, khususnya isu terorisme. Isu keamanan non-tradisional, seperti insurgensi dan terorisme muncul ke permukaan dan secara cepat menjadi agenda utama ASEAN (Acharya, 1998). Di saat itu, bahkan sampai kini, ASEAN sebagai komunitas regional masih banyak memiliki konflik antar sesama, khususnya soal perbatasan. Padahal, pendekatan *intergovernmental* menangani ancaman terorisme membutuhkan partisipasi seluruh negara anggota, namun terkadang respon negara-negara ASEAN harus berbenturan dengan kepentingan domestiknya masing-masing. ASEAN seolah enggan untuk melakukan reformasi institusi karena sering bertabrakan dengan prinsip kedaulatan nasional dan non-intervensi. Aktivitas kejahatan transnasional merupakan ancaman bagi kedaulatan dan integritas suatu negara secara individu. Namun, kerjasama antar negara melawan kejahatan transnasional membutuhkan penyerahan sebagian dari kedaulatan negara. Hambatan-hambatan inilah yang menjadi tantangan bagi ASEAN sebagai institusi regional dalam melakukan kerjasama kontraterorisme (Emmers, 2003).

Pola Operasi Kelompok Abu Sayyaf

Mulai dari dibentuknya, Abu Sayyaf telah menjalankan berbagai pola operasi yang meresahkan masyarakat. Berbagai bentuk operasi telah dilakukan yang menjadi sebuah modus operandi yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf seperti pengeboman (high profile bombing), serangan bersenjata (*urban terrorism*), pembunuhan, pemenggalan, pembajakan, dan terorisme maritim (Chalk, 2009). Pada bulan Februari 2005 Kelompok Abu Sayyaf melakukan pengeboman yang dikenal dengan sebutan “pengeboman hari valentine” yang dilakukan di kota Davao, General Santos City, dan Manila. Pengeboman tersebut dilakukan secara beruntun dan mengakibatkan delapan korban jiwa.

Setelah itu, pada bulan Maret 2005 ASG melakukan serangan bersenjata di kota Markati yang merupakan tempat wisata turis dan pebisnis luar negeri. Serangan tersebut mengakibatkan 7 korban jiwa dan kurang lebih 150 korban luka-luka (Chalk, 2009). Lalu, pada 27 Mei 2001 Abu Sayyaf telah menculik tujuh belas orang Filipina dan tiga orang Amerika Serikat (AS) di resor Dos Palmas yang terletak di Palawan, Filipina. Mereka melakukan penyanderaan hingga bulan Juni 2001. Abu Sayyaf melakukan pembunuhan terhadap beberapa sandera dan melakukan pemenggalan kepala terhadap salah satu sandera. Kelompok Abu Sayyaf juga pernah melakukan percobaan pembajakan pesawat komersial Trans-Atlantik Amerika Serikat. Kemudian, terkait terorisme maritim, pada 27 februari 2004 Abu Sayyaf melakukan pengeboman terhadap kapal Super Ferry 14, dengan jumlah penumpang sebanyak 899 orang, ketika berlayar dari pelabuhan Manila menuju Cagayan de Oro City (Banlaoi, 2008).

Tindakan teror Abu Sayyaf sering melalui jalur sepi dan pada malam hari. Pola ini untuk mengurangi konfrontasi dengan militer Filipina. Abu Sayyaf memiliki geng motor yang berjumlah 70 orang dengan sebutan kelompok teroris perkotaan. Geng motor ini telah melakukan penculikan dan pembunuhan di Kota Jolo, hingga Agustus 2006 (Santos, 2010). Jumlah anggota Abu Sayyaf tidak bisa dipastikan, apalagi mereka mendapatkan sokongan dari warga setempat dengan melakukan propaganda agama dan politik, serta pemaksaan untuk mendapatkan tenaga kerja dan logistik. Dengan dukungan tersebut Abu Sayyaf dapat melakukan berbagai aktivitas serangan tidak hanya di Basilan dan Sulu, namun juga beberapa wilayah lain di Filipina.

Kelompok Abu Sayyaf menjalin kerjasama dengan kelompok teroris lain yang beroperasi di Filipina, kelompok-kelompok tersebut meliputi JI, MNLF, MILF dan RSM (Banlaoi, 2008). Selain kelompok tersebut Abu Sayyaf juga mendapatkan bantuan material, kepemimpinan, dan pelatihan dari Al-Qaeda. Hanya dalam waktu 3 tahun di Filipina sudah sering terjadi aksi teror. Dari tahun 2015 sampai dengan 2017 telah terjadi 2045 kasus, semua terafiliasi ke Abu Sayyaf. Mereka tersambung dengan kelompok dan jaringan yang lebih besar, yaitu MNLF dan MILF, namun hampir 70% kasus teror di dalangi oleh Abu Sayyaf.

Pertempuran Kota Marawi

Pertempuran kota Marawi adalah aksi militan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf dan kelompok Maute. Marawi adalah ibukota Provinsi Lanao del Sur di Pulau Mindanao Selatan. Di Marawi terjadi pengepungan selama lima bulan dari tanggal 23 Mei 2017 sampai 23 Oktober 2017. Pertempuran ini melibatkan militer, kepolisian, dan IS yang berafiliasi dengan kelompok terorisme domestik (Maute dan Abu Sayyaf). Aksi ini serupa dengan apa yang terjadi di Aleppo, Mosul, Raqqa dan kota-kota lain di wilayah Iraq dan Suriah (Gunaratna, 2017). Pertempuran Marawi dengan cepat menyebar di berbagai penjuru kota dengan kehadiran kelompok-kelompok militan yang mengambil alih lokasi-lokasi strategis termasuk bangunan pemerintah (Reliefweb, 2017). Kelompok Maute melakukan aksi insurgensi secara cepat dan sistematis di berbagai wilayah di Filipina.

Klan Maute dan kelompok Abu Sayyaf yang terlibat dalam Pertempuran Marawi dipimpin oleh Maute bersaudara, Omar Khayyam dan Abdullah yang juga memimpin Islamic State Lanao (ISL), sedangkan kelompok Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Isnilon Hapilon telah dideklarasikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpin Islamic State Philippines (ISP) (Fonbuena, 2017). Ia juga diproyeksikan sebagai pemimpin Daulah Islamiya Wilayahul Musriq yang merupakan ekspansi ISIS wilayah Asia Timur (Banlaoi, 2017). Terdapat setidaknya 300 pejuang IS yang memulai penyerangan di Marawi. Pejuang tersebut diantaranya terdiri dari Pejuang ISL dan pejuang luar negeri utamanya warga negara Indonesia dan Malaysia serta dukungan dari kelompok Abu Sayyaf dan Balik Islam (Gunaratna, 2017). Kelompok yang bergabung dengan Maute dan Abu Sayyaf pada pertempuran Marawi tidak hanya berasal dari kawasan tersebut, namun juga melibatkan pejuang-pejuang luar negeri, seperti dari Indonesia dan Malaysia (Stange, 2018).

Pertempuran Marawi ini memiliki perbedaan karakteristik dengan era JI (Jamah Islamiyah). Penguasaan Marawi menunjukkan peningkatan kapabilitas agen kejahatan transnasional dalam melakukan pergerakan ditengah kelalaian pemerintah Filipina yang meremehkan ancaman terorisme. Ancaman terorisme yang diterima selanjutnya tidak hanya bersifat domestik namun juga regional. Hal ini tidak lain karena ideologi ekstrimisme dan kekerasan dapat bertumbuh dan berkembang dengan

cepat pada cakupan geografis yang relatif dekat dan mengubah stabilitas ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu kawasan (Gunaratna, 2018).

Karakteristik terorisme yang telah bersatu dengan insurgensi antara lain merupakan penyatuan dari motivasi apokaliptik, memiliki keterkaitan agama dengan kekerasan. Serangan teroris dengan dampak masif yang mana memiliki kemungkinan untuk digunakan bersama senjata penghancur masal, tanpa melihat batas-batas negara. Dalam hal ini, terorisme merupakan produk yang terkait dengan ekonomi global dan muncul sebagai dampak dari globalisasi (Hoffman, 1997). Pertempuran Marawi dengan demikian merupakan demonstrasi dari konvergensi insurgensi dan terorisme.

Dampak Peristiwa Marawi pada Sekuritisasi Ancaman Terorisme

Operasi Militer merupakan kegiatan melindungi, mengorganisir, merencanakan, menjalankan pelatihan, dan menetralsir ancaman dengan penggunaan kekerasan. Militerisasi juga didefinisikan sebagai proses implementasi elemen utama dari model militer dalam situasi spesifik (Kraska, 2007). Militeristik didefinisikan sebagai upaya penggunaan komponen-komponen militer dalam mencapai tujuan terkait. Umumnya terminologi militeristik berhubungan dengan kebijakan negara dalam melakukan operasi militer, maupun respon militer terhadap isu ancaman terhadap negara (Adelman, 2003).

Permasalahan yang dihadapi ASEAN jika ingin meningkatkan kemampuan militernya untuk menghadapi ancaman terorisme adalah karena adanya prinsip non-intervensi. Meluasnya cakupan peran militer dalam operasi anti-teror, contohnya adalah melakukan intervensi langsung menggunakan pasukan, operasional intelijen, hingga operasi langsung ke sasaran ‘sarang’ teroris. Intervensi militer secara langsung terhadap teroris oleh militer dari negara lain bersamaan dengan bantuan militer, pendekatan personal, dan teknologi untuk menjalankan aliansi merupakan karakteristik fundamental dan tujuan dari APSC (Tan, 2008).

Pasca pertempuran Marawi, ASEAN sebagai organisasi regionalisme perlu meningkatkan perannya untuk mencegah, bahkan melawan mencegah aksi terorisme transnasional secara efektif dan

nyata, dibandingkan hanya menjadi perantara dan sebatas mengkampanyekan kontraterorisme (Sumpter, 2018). Dalam merespon Pertempuran Marawi negara-negara anggota ASEAN memiliki refleksi yang berbeda mulai dari penegakan hukum yang diajukan oleh Brunei, Kamboja, Indonesia, dan Singapura, hingga kebijakan koersif dan militeristik yang diimplementasikan oleh Filipina, Malaysia dan Thailand (Tan, 2018).

Singapura dan Malaysia melakukan pengerahan intelijen dan kepolisian. Singapura secara spesifik menekankan penggunaan Army Deployment Force untuk menciptakan respon konsisten dalam melawan serangan teror di negara tersebut (Suorsa, 2018). Malaysia menggunakan National Special Operations Force (NSOF) yang berada langsung dibawah komando Perdana Menteri untuk merespon terorisme di Malaysia (Leong, 2016). Myanmar mengambil tindakan keras untuk melakukan pencarian hingga mengeksekusi militan Muslim yang mana searah dengan eksekusi Muslim Rohingya di Utara Arakan (Suorsa, 2018). Thailand meningkatkan peran militer di seluruh bagian negara khususnya di bagian Thailand Selatan (Soursa, 2018). Brunei Darussalam secara tegas mengatur tata aturan dan pemberian hukuman bagi terorisme yang tercantum pada konstitusi Brune Darussalam (Suorsa, 2018).

Indonesia pada tahun 2017 berusaha mengadopsi strategi yang diharapkan mampu menyelesaikan terorisme di lingkungan internalnya. Densus 88 dibentuk untuk bekerjasama dengan dewan dan pemerintah lokal, pemimpin agama, hingga masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan aktivitas militan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyebut hal ini sebagai sistem peringatan dini. Dalam aspek militer, Indonesia melakukan penambahan pasukan Densus 88 pada tahun 2018 mencapai 600 anggota yang merupakan dua kali lipat dari sebelumnya (Caruso, 2018). Pada aspek kerjasama dengan negara lain, pada Oktober 2017 Indonesia melakukan kerja sama pertukaran informasi intelijen strategis “Our Eyes” yang diajukan dengan melibatkan enam negara ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura dan Filipina.

Institusi penegakan hukum dan badan unit khusus kontraterorisme negara-negara ASEAN menghadapi minimnya kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan dana operasional dari

pemerintah. Hal ini menjadi salah satu isu yang menjadi penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan-badan tersebut bersamaan dengan isu kepercayaan publik terhadap terorisme. ASEAN pada kenyataannya membentuk respon terhadap peristiwa Pertempuran Marawi dengan keterlibatan militer dalam aksi kontraterorisme di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Filipina (Suorsa, 2018).

Berdasarkan krisis yang berkembang dalam pertempuran Marawi yang menunjukkan evolusi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara, Menteri Pertahanan dan Keamanan negara-negara ASEAN secara lebih lanjut mengatakan kesediaan untuk memperkuat kerangka operasi intraregional dengan menggunakan instrumen *hard power* untuk menghentikan serangan teroris di masa depan. Hal ini dapat dilihat melalui ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) yang mengalami revisi pada tahun 2017 dan di adopsi di Manila pada 20 September 2017 pada pasal 9.8 (ASEAN, 2017).

Pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan dengan pengembangan program dan pelatihan, serta simulasi di daerah perbatasan nasional. Hal ini termasuk mengimplementasikan atau meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap batas-batas negara yang rentan digunakan sebagai jalur masuk teroris. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah infiltrasi teroris dan mencegah penyelundupan senjata tanpa sepengetahuan pemerintah. Implementasi dari ACCT ini tertuang pada Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) yang dilakukan antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia di laut Sulu. Komponen utama dari TCA adalah pelaksanaan patroli maritim trilateral oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang sudah dimulai sejak Juni 2017. Komando Maritim Pusat (KMP) didirikan di Tarakan, Tawau di Sabah dan Bongao di Filipina, yang mana Singapura dan Brunei Darussalam berperan sebagai pengawas. Sebagai tambahan Singapura menawarkan bantuan informasi untuk memfasilitasi penyebaran informasi dalam agenda KMP (Ryacudu, 2018). Singapura secara lebih lanjut mengajukan aksi 3R yakni *Resilience*, *Recovery*, dan *Response* sebagai formula untuk mengarahkan mobilisasi sumber daya ASEAN dan aksi kolektif melawan terorisme (Tan, 2018).

Militerisasi dalam sekuritisasi ancaman terorisme di Asia Tenggara dilakukan guna memberi pesan konvergen tentang pentingnya peran ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. ASEAN sebagai institusi regional memiliki APSC sebagai salah satu penyedia kooperasi keamanan regional

guna mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan penggunaan militer. Pertempuran Marawi merupakan pelajaran bagi ASEAN tentang kemampuan insurgen yang menguasai kota dalam waktu lima bulan dikarenakan lemahnya pemerintah dan kerjasama dalam aspek militer. Konsiderasi politik domestik mengarahkan masing-masing negara anggota ASEAN untuk mengambil langkah yang berbeda terkait strategi anti-terorisme. Terdapat pandangan bahwa komponen militer lebih mampu untuk mencegah terorisme dibanding komponen sipil seperti kepolisian (Tan, 2018). Namun kerjasama negara-negara anggota ASEAN harus menghilangkan kecurigaan satu sama lain karena terdapat perbedaan kapabilitas militer. Kerjasama militer juga yang berkaitan dengan kedaulatan yang sesuai norma ASEAN yaitu prinsip non-intervensi. Prospek kerjasama Asia Tenggara untuk bergabung melawan terorisme merupakan tantangan bagi kawasan tersebut khususnya sebagai negara yang memiliki sejarah buruk dengan militer (Tan, 2018).

Menurut perspektif pro-militer, aktivitas hingga ancaman aktor non-negara seharusnya ditangani oleh militer sebagai elemen utama sektor keamanan. Mengacu pada asumsi ini, maka peran aktif militer sebagai aksi kontraterorisme di Asia Tenggara dibutuhkan untuk melawan insurgensi yang terjadi di dalam negara. Negara-negara di ASEAN sepakat untuk melakukan strategi kontraterorisme dengan membatasi keterlibatan aksi militer lintas batas (ASEAN, 2017). Dari pemaparan tersebut dapat diambil benang merah bahwa meskipun peningkatan militer dibutuhkan untuk menanggulangi isu terorisme yang menunjukkan signifikansi ancaman insurgensi dan terorisme di kawasan.

Kesimpulan

Perebutan kota Marawi yang diduduki oleh Abu Sayyaf dan Maute, serta kelompok-kelompok koalisinya menunjukkan evolusi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa Pertempuran Marawi menunjukkan karakteristik konvergensi insurgensi dan terorisme, serta urgensi ASEAN sebagai organisasi regional dalam meningkatkan perannya melawan dan mencegah aksi terorisme transnasional secara efektif dan konkrit. Langkah ASEAN adalah melakukan kerjasama

militeristik yang tertuang pada revisi ACCT tahun 2017 dengan substansi pengembangan program dan pelatihan serta simulasi di daerah perbatasan nasional, dengan meningkatkan patroli pengawasan perbatasan negara yang rentan digunakan sebagai jalur masuk teroris dan penyelundupan senjata. ASEAN harus melibatkan militer terkait dengan sekuritisasi ancaman terorisme di wilayahnya. Sekuritisasi dan kerjasama keamanan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN belum efektif karena adanya beberapa hambatan, seperti ASEAN Way, kebijakan menghormati kedaulatan nasional masing-masing negara individu, serta prinsip non-intervensi. Selain itu, proses pembuatan kebijakan yang lamban, sampai perbedaan kultural masing-masing anggota ASEAN membuat ancaman terorisme menguat di kawasan ini.

Referensi

Abuza, Z. 2011. *The borderlands of Southeast Asia: Geopolitics, Terrorism, and Globalization*. Australia: National Defense University.

Acharya, A. 1998. Culture, Security, Multilateralism: The 'ASEAN Way' and Regional Order. *Contemporary Security Policy*, 19. <https://doi.org/10.1080/13523269808404179>

Adelman, M., 2003. The military, militarism and the militarization of domestic violence. *Violence Against Women*, 9(9). <https://doi.org/10.1177/10778012032552>

ASEAN. 2017 *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ACPoA-on-CT-Adopted-by-11th-AMMTC.pdf>

Atkinson, G. 2012. Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman. A review of the Rise of Islamic Insurgency in the Southern Philippines. *Perspective: American Security Project*.

Banlaoi, R. (2008). *Philippine Security in the Age of Terror: National, regional, and Global Challenges in The Post-9/11 World*. London: CRC Press.

Banlaoi, R.C. 2017. *Philippines-China Security Relations: Current Issues and Emerging Concerns*. Manila: Yuchengo Center De La Salle University.

Borelli, M., 2017. ASEAN Counter-terrorism Weaknesses. *Counter Terrorist Trend and*

Analyses, 9(9).

Boyle, M. J. 2010. Do Counterterrorism And Counterinsurgency Go Together? *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 86(2).

Buzan, B., & Weaver, O. 2003. *Regions and Powers : The Structure of International Security*. UK : Cambridge University Press.

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.

Caruso, P. 6 Februari 2018. Indonesia and Terrorism: Success, Failure, and an Uncertain Future. <https://www.mei.edu/publications/indonesia-and-terrorism-success-failure-and-uncertain-future>

Chalk, Paul, dkk. 2009. *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia*. Santa Monica: RAND

Davis, P. K., & Jenkins, B. M. 2004. A System Approach to Deterring and Influencing Terrorists. *Conflict Management and Peace Science*, 21(1). <https://doi.org/10.1080/07388940490433873>

Emmers, R., 2003. ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia. *The Pacific Review*, 16(3). <https://doi.org/10.1080/0951274032000085653>

Fellman, Z. 28 November 2011. Abu Sayyaf Group. <https://www.csis.org/analysis/abu-sayyaf-group>

Gregory, Derek, 2006. The Death of the Civilian? *Environment and Planning D: Society and Space*, 24(5). <https://doi.org/10.1068/d240>

Gunaratna, R, 2017. The Siege of Marawi: A Game Changer in Terrorism in Asia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 9(7)

Gunaratna, R, 2018. ASEAN's Greatest Counter-Terrorism Challenge: The Shift from "Need to Know" to Smart to Share, dalam *Combatting Violent Extremism and Terrorism in Asia and Europe*. Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung

Hoffman, B., 1997. The Confluence of International and Domestic Trends in Terrorism. *Terrorism and Political Violence*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/09546559708427399>

Indrawan, J. 2019. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

Kilcullen, D, 2009. *The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One*. New York: Oxford University Press

Kraska, P.B. 2007. Militarization and policing: Its relevance to 21st century police. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 1(4). <https://doi.org/10.1093/police/pam065>

Leong, T, 26 Oktober 2016. Malaysia Creates Anti-Terror Force for Quick Response. <https://www.thejakartapost.com/seasia/2016/10/28/malaysia-creates-anti-terror-force-for-quick-response.html>

Marks, T. A, 2004. Ideology of Insurgency: New Ethnic Focus or Old Cold War Distortions? *Small Wars & Insurgencies*, 15(1). <https://doi.org/10.1080/09592310410001677014>

New York Times. 22 Juni 2002. Philippines Reports a Top Muslim Rebel Leader Died in Clash. <https://www.nytimes.com/2002/06/22/world/philippines-reports-a-top-muslim-rebel-leader-died-in-clash.html>

Pujayanti, A. (2016). Upaya Pembebasan WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI*, 8(7).

Reliefweb, 2017. Philippines: IDP Protection Assessment Report-Armed Confrontations and Displacement in Marawi (AFP Vs Pro-ISIS). <https://reliefweb.int/report/philippines/philippines-idp-protection-assessment-report-armed-confrontations-and-4>

Rostow, W. W. 1962. Guerrilla Warfare in the Underdeveloped Areas. *Fleet Marine Force Reference Publication*, 46(1).

Ryacudu, R. 2018. Terrorism in Southeast Asia: The Need for Joint Counter- Terrorism Frameworks. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 10(11).

Santos, D. N, 2011. Counterterrorism v. Counterinsurgency: Lessons from Algeria and Afghanistan. <https://smallwarsjournal.com/2011/03/14/counterterrorism-v-counterinsurgency-lessons-from-algeria-and-afghanistan/>

Santos, S. M. 2010. *Primed And Purposeful Armed Groups And Human Security Efforts In The Philippines*. Geneva: Small Arms Survey: Graduate Institute of International and Development Studies.

Suorsa, O. 2018. The Growing Role of the Military in Counter-Terrorism in Southeast Asia. *ISEAS Yushof Ishak Institute*, 69.

Stange, G. 2018. From Frustration to Escalation in Marawi: An interview on conflict transformation in Southeast Asia with the Indonesian peace and conflict advisor Shadia Marhaban. *ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0007>

Stritzel, H. 2011. Security: The Translation. *Security Dialogue*, 42(4-5).

Sumpter, Cameron. 2018. "An ASEAN Way to Prevent Violent Extremism?" *RSIS Commentaries*, 158-18. Singapore: Nanyang Technological University.

Tan, A.T.H. 2018. Evaluating Counter-Terrorism Strategies in Asia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter-Terrorism*, 13(2). <https://doi.org/10.1080/18335330.2018.1473628>

Wibisono, A. N. (2016). Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jiu.v3i1.4856>